	News Title : Asyik.. Bappebti Sudah Tetapkan Kantor Bursa Kripto	
	Media Name : investor.id	**Journalist** : Lona Olavia
	Publish Date : 28 December 2021	**Tonality** : Positive
	News Page :	**News Value** : 90,000,000
	Resources : Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Kementerian Perdagangan), Stephanus Paulus Lumintang (Direktur Utama JFX), Indrasari Wisnu Wardhana (Kepala Bappebti)	**Ads Value** : 30,000,000
	Section/Rubrication : Market and Corporate	**Topic** : Bursa Kripto



Perdagangan aset kripto tumbuh pesat di Indonesia

Asyik.. Bappebti Sudah Tetapkan Kantor Bursa Kripto

Selasa, 28 Desember 2021 | 10:09 WB

Lona Olavia

pengembangan bursa kripto di Indonesia. Kantor tersebut berada di The City Tower Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat. Pemilihan lokasi tersebut tidaklah mengherankan karena Digital Futures Exchange (DFX) memang beroperasional disana.

"Iya betul di tempat tersebut, *progress* sedang proses persetujuan sebagai bursa berjangka dahulu sesuai Peraturan Bappebti (Perba) 1 tahun 1999 tentang perizinan bursa berjangka dan kliring berjangka diharapkan akhir tahun ini selesai. Dan selanjutnya sesuai Perba 8 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan pasar fisik aset kripto, maka PT tersebut harus melengkapi syarat sebagai bursa kripto dan diharapkan kuartal I-2022 bisa segera terwujud," ucap Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Kementerian Perdagangan Tirta Karma Senjaya kepada *Investor Daily*, Selasa (28/12).

Baca juga: Selamat Datang Bursa Kripto

DFX sebagai bursa aset kripto di Indonesia, dikatakannya memang akan beroperasional pada kuartal I-2022. Namun, menurutnya bisa lebih cepat jikalau syarat-syarat untuk pendiriannya sudah lengkap semua, terutama dalam hal permodalan. Mengacu pada beleid yang disahkan pada awal tahun lalu tersebut, BAPPEBTI menyatakan beberapa ketentuan teknis yang harus dipatuhi oleh pemain kripto. Di antaranya adanya bursa berjangka, pasar fisik aset kripto, lembaga kliring berjangka, pengelola tempat penyimpan aset kripto, pedagang fisik aset kripto harus memiliki modal Rp 1 triliun.

"Sebagai bursa berjangka seperti halnya ICDX dan JFX perlu modal Rp 100 miliar. Lalu sebagai bursa kripto harus jadi Rp 500 miliar dan 3 bulan kemudian harus jadi Rp 1 triliun," sebutnya.

Sementara itu, kehadiran bursa kripto DFX sangat diperlukan, supaya fokus dalam pengawasan transaksi dan pelaporannya. Realisasi DFX menjadi semakin menarik lantaran Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang akan meregulasi bursa khusus untuk aset kripto. Apalagi saat ini teknologi yang berkembang terutama dalam transaksi aset kripto yaitu blokchain. Oleh karena itu, Bappebti memisahkan transaksi aset kripto dan komoditas meski kripto masuk komoditas. Hal ini juga untuk hindari peretasan.

"Memberikan kepastian bagi pedagang atau investor yang jadi pedagang aset kripto di dalam negeri. Selama ini ada yang bergabung ke exchanger di luar, perilaku seperti pedagang, *marketplace* di dalamnya jual beli. Kalau ini kumpulkan pedagang (di bursa kripto-red), pedagang semua tercatat, transaksi kliring tercatat, pencairan dana ada di kliring," tegas Tirta.

Baca juga: Awal 2022, Investor Kripto Bisa Tembus 10 Juta

Bappebti, sambungnya juga tengah menyiapkan *self regulatory organization* (SRO) sehingga ada kliring,kustodian, dan bank penjamin untuk pembentukan bursa kripto. "Kita yang pertama di dunia. Ada SRO terkait bursa kripto. Kalau di Asia, Singapura di sana melarang salah satu pedagang besar. Di Indonesia, diperbolehkan tetapi diatur," pungkasnya.

Adapun, ICDX dan JFX tetap sebagai bursa berjangka komoditi dan derivatif. Seperti diketahui, Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia (*Indonesia Commodity and Derivatives Exchange*/ICDX) berencana meluncurkan bursa untuk akomodasi perdagangan aset kripto. Sedangkan, Jakarta Future Exchange (FJX) atau Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) merupakan salah satu pemegang saham dari DFX.

"ICDX dan JFX agar fokus pada peningkatan transaksi perdagangan berjangka komoditi terutama multilateral. Kalau misalnya mau daftar jadi bursa kripto, maka sesuai Perba 8 Tahun 2021 khususnya pasal 5 ayat 4 di mana bursa berjangka yang mendapatkan persetujuan menyelenggarakan perdagangan kripto tidak dapat menyelenggarakan transaksi komoditi lainnya," tegasnya.

Meski demikian, Tirta menegaskan, PT DFX akan berdiri independen. Namun, dibawah pembinaan dan pengawasan Bappebti sesuai ketentuan perundangan UU dan PP Perdagangan Berjangka Komoditi.

Baca juga: Sentimen Positif Berdatangan, Aset Kripto Berpotensi Menanjak Kembali

Direktur Utama JFX Stephanus Paulus Lumintang mengatakan, Bappebti baru-baru ini sudah melakukan *site visit* ke kantor DFX untuk mengecek kesiapan infrastruktur untuk operasional bursa kripto. Namun, sampai saat ini pihaknya mengaku belum mengetahui keputusan resminya mengenai kapan waktunya untuk bursa kripto beroperasional. "Bappebti sudah cek fisik kantor dan infrastrukturnya, tinggal tunggu keputusannya saja. Di The City Tower, satu gedung dengan BBJ tapi beda lantai dan manajemennya juga berbeda. Dia (DFX, red) independen," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan bahwa saat ini Bappebti telah menyusun sejumlah kebijakan terkait perdagangan fisik aset kripto di Indonesia. Adapun, kebijakan yang telah disusun di antaranya pembentukan ekosistem kelembagaan pasar fisik aset kripto yaitu bursa aset kripto, lembaga kliring dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto. Kemudian, melakukan penetapan jenis aset kripto baru yang dapat diperdagangkan.

Berdasarkan data Bappebti, jumlah investor aset kripto di Indonesia mencapai angka 9,5 juta investor per Oktober 2021. Sementara, transaksi investasi kripto di Indonesia tembus Rp 478,5 triliun per Juli 2021 atau naik 5 kali lipat. Sedangkan, nilai transaksi di pasar kripto Indonesia rata-rata bisa capai Rp 1,7 triliun per hari.

Kehadiran bursa kripto di Tanah Air memang akan terwujud sebentar lagi. Pasalnya, Bappebti sudah mengadakan *fit and proper test* kepada calon dewan komisaris dan calon direksi bursa kripto, pada akhir November lalu. "Bursa untuk kripto sedang dalam proses verifikasi administrasi dan teknis," ucap Wisnu.